



Available online at [journal.unhas.ac.id/index.php/HJS](http://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS)

# HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 3, Issue 2, 2021

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

## **Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)**

*Sustainable Development Goals (SDGs) Policy in Reducing Poverty of Rural Society (Case Study: Wargajaya Village, Cigudeg District, Regency of Bogor, Jawa Barat)*

**Islam Faruk Zaini<sup>1</sup>, Rahmat Muhammad<sup>2</sup>, Muh. Iqbal Latief<sup>3</sup>, Andi Haris<sup>4</sup>, Suryanto Arifin<sup>5\*</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: islamf178@gmail.com*

<sup>2</sup> Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: rahmatmuhammad131@gmail.com*

<sup>3</sup> Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: muhilberkelana@gmail.com*

<sup>4</sup> Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: aharis2000@yahoo.com*

<sup>5</sup> Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. *Email: suryanto@unhas.ac.id*

### ARTICLE INFO

#### **How to Cite:**

Zaini, I. F., Muhammad, R., Latief, M. I., Haris, A., & Arifin, S. (2021). Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 3(2), 126-140.

#### **Keywords:**

*SDGs, SDGs Desa, Aid, Poverty*

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the form of implementing sustainable development goals (SDGs) in poverty reduction in rural areas and to know people's perception of the program implementation of Sustainable Development Goals. The subject on this research are four government staff of Desa Wargajaya Village, one Village companion, one RW chairman and three society of Wargajaya Village. This research approach is used qualitative method, which starts with data and goes down to conclusions. The purpose of the research used is a description, presenting a picture of a phenomenon that exists in the field systematically and factually. The basis of research is a useful case study for collecting and analyzing a particular process related to the focus of research, so as to find a limited scope of certain phenomena. The results show that in implementing the Sustainable Development Goals, the Wargajaya Village government applies a derivative program launched by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, namely the SDGs Desa. The SDGs Desa in their application are intended to collect data on residents, village officials (village) and community associations (RW).*

**Kata Kunci:**

SDGs, SDGs Desa, Bantuan, Kemiskinan

*This is intended to get a concrete picture of the problems and life of the people in Wargajaya Village. Of course, there are assistance programs for the poor in Wargajaya Village in the form of Uninhabitable Houses (RTLH), Village Fund Direct Aid (BLT-DD) and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) whose purpose is as a stimulus for the Wargajaya Village community. who are in the category of poor people. The Wargajaya Village community did not understand the SDGs Desa's program, because there was no socialization to the community regarding the program of SDGs Desa about the objectives and benefits of the SDGs Desa for the community. The community understands and knows more about concrete programs in the form of assistance in the form of money and basic necessities.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Sustainable Development Goals. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 Pemerintah Desa Wargajaya, 1 Pendamping Lokal Desa, 1 Ketua RW dan 3 Masyarakat Desa Wargajaya. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif, yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Tujuan penelitian yang digunakan adalah deskripsi, mengemukakan gambaran mengenai suatu fenomena yang terdapat di lapangan secara sistematis dan faktual. Dasar penelitian adalah studi kasus yang berguna untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian, sehingga dapat menemukan suatu lingkup fenomena tertentu yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Sustainable Development Goals pemerintah Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa. SDGs Desa dalam pengaplikasiannya ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa (desa) dan rukun warga (RW). Hal itu ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai persoalan dan kehidupan masyarakat di Desa Wargajaya. Tentu saja, terdapat program-program bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Wargajaya berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tujuannya adalah sebagai stimulus bagi masyarakat Desa Wargajaya yang berada dalam kategori masyarakat miskin. Masyarakat Desa Wargajaya tidak memahami program SDGs Desa itu, karena tidak terdapat sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program SDGs Desa tentang tujuan dan manfaat SDGs Desa bagi masyarakat. Masyarakat lebih memahami dan mengetahui program-program konkret berupa bantuan-bantuan yang berbentuk uang dan sembako.

**1. PENDAHULUAN**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Mengingat bahwa sebelumnya telah terbentuk program pembangunan dengan tujuan serupa SDGs, meskipun cakupan yang dimilikinya

tidak seluas dan seambisius SDGs, yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Namun, MDGs dalam pelaksanaannya tidak bersifat terbuka, yang mana hanya menjadikan negara-negara berkembang sebagai objek dari pembangunan. Implikasi dari objektivikasi negara berkembang dalam pembangunan MDGs adalah bahwa negara-negara berkembang hanya menjadi ajang program pembangunan yang diselenggarakan oleh negara-negara adidaya (Woodbridge, 2015).

SDGs terlahir sebagai respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang adil, aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. SDGs merefleksikan prinsip moral bahwa tidak ada satupun negara yang boleh berada dalam keadaan tertinggal, sementara negara lain mengalami kesejahteraan; setiap individu dan negara bertanggungjawab untuk memainkan peran mereka dalam menyampaikan visi global mengenai SDGs (Osborn et al., 2015). SDGs memiliki 3 pilar dalam pelaksanaannya, yaitu 1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; 2) pilar ekonomi, pembangunan ekonomi; dan 3) pilar lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati (Murniningtyas & Alisjahbana, 2018).

Untuk persoalan mengenai kemiskinan yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini diambil dari pilar pembangunan sosial, yang mana di dalamnya terdapat tujuan nomor 1) *no poverty* dari program SDGs. Namun, tujuan pertama dari SDGs tersebut tidak bisa berdiri sendiri, dikarenakan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, maka suatu keniscayaan bahwa tujuan pertama dari SDGs dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang lain, seperti tujuan nomor 2) *no hunger*, 3) *good health*, 4) *quality education* dan 8) *good jobs and economic jobs*. Sehingga hasil akhir yang ingin dicapai ialah suatu masyarakat yang kokoh, di mana masyarakat tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang ada dari luar, melainkan masyarakat telah memiliki modal sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Salah satu ciri kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas antara perkotaan dan pedesaan. Yang mana wilayah pedesaan mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pada Maret 2020 tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38% (11,16 juta orang), adapun di pedesaan tercatat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 12,82% (15,26 juta orang). Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan data di tahun 2019, di mana untuk wilayah perkotaan sebesar 6,56% dan pedesaan sebesar 12,60% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan, pemerintah Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Tujuannya adalah sebagai program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dana desa

tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Adapun latar belakang kehadiran SDGs desa adalah: (1) dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah; dan (2) dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Dalam SDGs Desa, terdapat delapan tipe desa yang berfungsi sebagai arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Adapun kedelapan tipe desa adalah sebagai berikut (Siswanto, 2021): (1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (3) Desa Peduli Kesehatan; (4) Desa Peduli Lingkungan; (5) Desa Peduli Pendidikan; (6) Desa Ramah Perempuan; (7) Desa Berjejaring; dan (8) Desa Tanggap Budaya.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat tidak bisa dianggap sepele. Tahun 2020 jumlah masyarakat miskin yang berada di wilayah Jawa Barat sebanyak 3,92 juta orang dengan presentase 7,88%. Angka tersebut merupakan sebuah persoalan serius, di mana kebanyakan wilayah Jawa Barat adalah pedesaan (Prasetya et al., 2020).

Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berada dalam naungan Provinsi Jawa Barat. Desa Wargajaya merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) milik desa Wargajaya tahun 2019, dari 2.249 kepala keluarga, 2.201 merupakan keluarga yang menyandang label keluarga miskin (Desa Wargajaya, 2019).

Berdasarkan uraian di atas mengenai tingginya tingkat kesenjangan antara masyarakat kota dan desa dan di mana populasi kemiskinan terbesar di Indonesia masih bertempat di wilayah pedesaan. Penelitian ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita mengkaji sejauh mana program SDGs Desa akan bekerja untuk meminimalisir persoalan kemiskinan di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan SDGs Desa pada Desa Wargajaya dan persepsi masyarakat mengenai program SDGs Desa. Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa”, agar memiliki pandangan yang sesuai dengan judul tersebut, maka sebaiknya kita memahami beberapa konsep berikut:

- **Teori Kemiskinan**

Kemiskinan menurut Louis-Marie (2015) merupakan permasalahan yang mengandung berbagai bentuk ketidakadilan, yang mana adalah sebuah sumber dari pencegahan sosial di dalam pendistribusian kondisi kehidupan yang esensial bagi martabat manusia. Kondisi-kondisi kehidupan ini sesuai dengan

kapabilitas individu, rumah tangga dan komunitas untuk memberikan akses terhadap kebutuhan dasar mereka dalam dimensi sebagai berikut: (1) pendapatan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) makanan/nutrisi; (5) air bersih/sanitasi; (6) pekerjaan; (7) perumahan; (8) akses terhadap aset produktif; (9) akses terhadap pasar; dan (10) partisipasi di dalam komunitas.

- **SDGs Desa**

Program SDGs Desa merupakan program turunan dari SDGs Nasional negara Indonesia, karena sifatnya yang turunan maka tujuan dan prospek dari program SDGs Desa juga terkait dengan SDGs Nasional. SDGs Desa sejatinya suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memberdayakan dan membangun wilayah pedesaan yang berkelanjutan untuk melawan kesan bahwa pembangunan hanya bersifat kotasentris.

SDGs Desa dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diartikan sebagai upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 2020). Dengan demikian, SDGs Desa menjadi suatu penciri dari negara Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap wilayah pedesaan, yang mana jumlah pedesaan di Indonesia berjumlah 74.943 desa.

- **Pemberdayaan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu metode yang dilaksanakan dalam rangka pekerja sosial, di mana seorang pekerja sosial memiliki tugas sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat menemukan jati diri dengan harapan masyarakat dapat mengetahui kekuatan yang mereka miliki untuk bangkit mendapatkan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat menurut Midgley (dalam Rumikno Adi, 2018) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi yang mengacu kepada 3 elemen utama, yaitu (1) tingkatan di mana suatu masalah sosial dapat dikelola; (2) sejauhmana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; dan (3) tingkatan di mana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah.

- **Teori Pembangunan**

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Jamaludin, 2016) setidaknya dalam pembangunan terdapat tiga tahapan dasar, yaitu: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan; dan (3) tahap evaluasi. Adapun pendekatan pembangunan umumnya terbagi menjadi dua pendekatan dalam pengambilan kebijakan

terhadap suatu proses pembangunan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pembangunan tidak bersifat *top-down* atau kebijakan yang berasal dari atas ke bawah (Digdowiseiso, 2012). *Top* yang dimaksud adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah atau struktur sosial tertentu, sedangkan *down* ialah masyarakat yang berada di barisan terbawah dari suatu kebijakan, yang seringkali dianggap sebagai objek dari suatu pembangunan. Pembangunan dengan model *top-down* cenderung menjadikan masyarakat sebagai kalangan yang tidak sadar dan memahami kebutuhan akan perubahan dan kemajuan, oleh karena itu pemerintah selalu mengeluarkan program-program pembangunan yang diasumsikan dapat menjadi jawaban bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kebijakan *top-down* seringkali masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan atau program suatu pembangunan. Lawan dari kebijakan *top-down* adalah kebijakan *bottom-up*. Pada pendekatan *bottom-up* fokus perhatian terjadi kepada para pembuat kebijakan level bawah dan masyarakat (kelompok sasaran). Pendekatan *bottom-up* percaya bahwa implementasi dari kebijakan atau program suatu pembangunan akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal proses hingga akhir (Utami, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan adalah kualitatif deskriptif metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2021. Sumber data dari hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, studi pustaka serta dokumen, catatan dan laporan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan tipe *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### • Pengentasan Kemiskinan Melalui SDGs

#### 1) Kemiskinan di Desa Wargajaya

Kemiskinan yang berada di wilayah Desa Wargajaya secara umum disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan yang jelas dari masyarakat desa. Yang mana ketiadaan pekerjaan jika dikaitkan dengan teori Robert Chambers mengenai kemiskinan, ketiadaan pekerjaan termasuk ke dalam kategori kerentanan dan ketidakberdayaan.

Ketiadaan pekerjaan menjadikan seorang individu sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari, sehingga mereka berada dalam kondisi yang tidak sejahtera secara struktural di masyarakat. selain itu, ketiadaan pekerjaan juga memberikan gambaran bahwa mereka yang miskin kurang mampu untuk mengakses sumber pendidikan, kesehatan, rumah layak dan sebagainya. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wargajaya diketahui sebanyak 2.201 kepala keluarga berada dalam kondisi miskin, dari 2.249 kepala keluarga yang ada.

Jumlah ini sangat mencengangkan, betapa banyaknya keluarga yang berada dalam kondisi miskin di wilayah Desa Wargajaya. Tentu jumlah kemiskinan ini tidak datang secara serta merta dan hasil terkaan belaka, melainkan didasarkan kepada ukuran-ukuran yang dirumuskan oleh pemerintah desa dalam membuat kategorisasi bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.

N2 selaku Kepala Desa menegaskan bahwa banyaknya masyarakat desa yang berada dalam kondisi rentan dan tidakberdaya disebabkan oleh kegiatan perekonomian di Desa Wargajaya bersifat musiman, yang mana menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi masyarakat desa. Banyaknya buruh tani dibandingkan petani yang memiliki lahan juga menjadi salah satu faktor kemiskinan yang ada. Berikut pernyataan N2.

*Kegiatan ekonomi masyarakat sebenarnya kalo disinikan kegiatannya dipertanian-pertanian serabutan, jadi ngga ada yang fokus pertanian apa gitu, jarang, paling padi juga. Itu juga serabutan asal tani aja, lebih banyak buruhnya. Buruh juga, buruh serabutan bukan buruh tetap. (Hasil wawancara dengan informan N2)*

Ciri kemiskinan di Desa Wargajaya tidak hanya sebatas kepada faktor ketiadaan pekerjaan saja, melainkan juga kondisi perumahan yang tidak layak huni. Rumah yang menjadi simbol bagi masyarakat sebagai tempat bernaung yang memberikan kondisi aman dan tenang dari berbagai resiko alam, seperti hujan, badai dan banjir. Rumah yang tidak layak huni bisa mengakibatkan kecelakaan atau bencana bagi para penghuninya, rumah yang berdiri dengan pondasi bangunan lemah sewaktu-waktu bisa menimpa para penghuni rumah tersebut, sehingga akan menimbulkan persoalan baru.

Louis-Marie (2015) menyebutkan dalam teorinya mengenai kemiskinan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu dan kelompok, di mana harus terdapat pendistribusian yang merata dikalangan masyarakat akan kebutuhan mendasar. Pendistribusian ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki wewenang, seperti pemerintah desa, daerah, maupun pusat sebagai bentuk pengabdian dan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin. Namun tidak hanya terbatas para pemangku jabatan terkait, masyarakat yang memiliki kelebihan materi atau memiliki kesadaran untuk saling membantu bisa turut serta berpartisipasi dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi sesama.

## **2) Program Pengentasan Kemiskinan**

Bantuan-bantuan atau program yang dihadirkan oleh pemerintah desa untuk pengentasan kemiskinan hanya berbasiskan kepada program yang diberikan kepada pemerintah, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk mengurangi masyarakat miskin. Namun dari ketiga program tersebut, hanya BLT-DD yang menggunakan anggaran dari dana desa, selebihnya dana dari pemerintah pusat dan daerah. Program bantuan kepada masyarakat miskin adalah bantuan yang diarahkan oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kepada desa. Pemerintah desa dalam hal ini hanyalah sebagai penyalur dan eksekutor dari program-program yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Sebagaimana yang dituturkan oleh N7 sebagai berikut.

*Pemerintah desa ngga ada program tersendiriya, cuma ikut yang diarahkan aja. Kan kalau dana desa turun mah biasanya uda ada potongan-potongan untuk program kemiskinan sendiri. Misalnya ya, 40% untuk program kemiskinan. Nah sisanya baru untuk infrastruktur.* (Hasil wawancara 17 April 2021).

*Pertama*, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah program bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dengan cara diberikan bantuan, adapun besaran bantuan yang diberikan tergantung kepada pagu dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi, swadaya masyarakat, dana desa dan lain sebagainya.

*Kedua*, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin di saat pandemi Covid-19. Untuk tahun 2020 para penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat, di tahun 2020 Desa Wargajaya menyalurkan sebanyak 256 bantuan BLT-DD per kepala keluarga. BLT-DD adalah program yang berfungsi sebagai pemberi jaminan masyarakat dalam hal kepemilikan dana untuk dapat membeli bahan pangan kebutuhan sehari-hari, tujuan yang ingin dicapai dari BLT-DD adalah stimulus bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi, selain itu BLT-DD juga berguna untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sebagai modal perangsang. Dana yang didapatkan masyarakat sebanyak Rp.300.000.- per bulan selama 12 bulan atau 1 tahun.

*Ketiga*, bantuan UMKM merupakan bantuan bagi masyarakat yang ingin membuka peluang usaha sebagai langkah penciptaan kreativitas dan keaktifan masyarakat dalam menghidupkan perekonomian. Pemerintah pusat meminta desa untuk mensosialisasikan adanya bantuan UMKM kepada masyarakat agar masyarakat yang kekurangan modal dapat terbantu untuk menghidupkan kegiatan usahanya.



### 3) Peran SDGs Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan dari SDGs Desa adalah untuk melakukan pembangunan bermodelkan kebijakan *bottom-up* agar lebih mengakar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bawah. Paradigma yang terbangun dalam SDGs Desa secara implisit adalah untuk menghilangkan kesan pembangunan yang bersifat kotasentris. Sebagaimana diketahui secara umum masyarakat pedesaan seringkali mendapatkan label sebagai masyarakat yang tertinggal, tidak berkembang, kuno, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirnya SDGs Desa ditunjukkan untuk menyeimbangkan tingkat pembangunan yang berada di kota, dengan maksud desa juga diharuskan berkembang dan sejahtera, baik secara ekonomi maupun sosial. Karena program SDGs Desa adalah program baru, maka hal pertama yang dilakukan untuk mendukung suksesnya program SDGs Desa adalah program pendataan desa, pemutakhiran IDM 2021 yang berbasis dengan SDGs Desa. Pemutakhiran data tersebut ditujukan untuk mendapatkan data yang lebih detail lagi pada tingkatan RT, keluarga dan warga (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2021).

Pentingnya program pendataan pada SDGs Desa dikarenakan data yang ada di desa tidak akurat dan seringkali berantakan. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap pergantian kepala desa dan perangkat desa, data-data yang ada di desa tidak ada.

Pendataan Desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 adalah proses penggalian, pengumpulan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020).

Berdasarkan hal di atas, N5 selaku PLD (Pendamping Lokal Desa) juga mengatakan hal yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh SDGs Desa sebagai langkah awal pemetaan pembangunan desa. Berikut pernyataan N5.

*Program SDGs itu kan melalui pendataan secara menyeluruh kepada masyarakat desa, baik itu tingkatan desanya secara kelembagaan, kemudian ketingkatan RT/RW, maupun kepada individu. Karena dalam instrumen SDGs semua pertanyaan itu masuk ke dalam semua kalangan, baik itu desa, RT/RW maupun individu. Di dalam pertanyaan tersebut jugakan menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi si masyarakat. (Hasil wawancara 26 April 2021).*

Dijadikannya proses pendataan sebagai instrumen pertama yang dilakukan dalam proses

pelaksanaan SDGs Desa dikarenakan selama ini pemerintah desa tidak memiliki data yang aktual dan akurat mengenai kondisi yang ada. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seringkali tidak berjalan secara maksimal. Pembangunan yang didasari pada terkaan atau perkiraan tidak akan mampu menjawab persoalan, yang terjadi justru sebaliknya menimbulkan permasalahan yang baru.

Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai keadaan desa ialah pertanyaan mengenai (1) identitas diri individu sebagai warga; (2) sumber penghasilan berdasarkan gaji, hasil pertanian dan peternakan; (3) kesehatan; dan (4) pendidikan. Data-data tersebut dikumpulkan oleh para relawan yang telah diberikan pelatihan dan memiliki akses terhadap aplikasi Pendataan SDGs Desa yang mana data-data yang telah dikumpulkan masuk ke dalam satu server Kemendes PDTT pada halaman <http://api-sdgs.kemendes.go.id>. Untuk selanjutnya dievaluasi oleh bagian terkait di Kemendes PDTT dan pemerintah desa menunggu arahan selanjutnya. Kehadiran program SDGs Desa tentu sangat membantu desa, *pertama* sebagai bentuk perwujudan konkret pemerintah dalam pembangunan yang inklusif bagi semua kalangan. *Kedua*, mendapatkan gambaran yang utuh dan faktual terhadap kondisi masyarakat pedesaan. *Ketiga*, menjadikan desa memiliki arah tujuan pembangunan yang jelas, baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan *keempat*, memberdayakan masyarakat desa yang masih menjadi wilayah kemiskinan terbanyak di Indonesia.

- **Persepsi Warga Terhadap Pengentasan Kemiskinan SDGs Desa**

Pembicaraan mengenai SDGs Desa akan terasa sulit untuk dipahami oleh masyarakat, sebab mereka tidak memahami apa itu SDGs Desa ditambah lagi penggunaan bahasa asing yang semakin menyulitkan masyarakat dalam memahaminya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam proses penggalian informasi masyarakat digunakan bahasa ‘pembangunan dan penanggulangan kemiskinan’ agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pemahaman mengenai SDGs Desa.

N6 salah satu informan peneliti yang bekerja sebagai wiraswasta ketika ditanyakan pandangannya mengenai pemberitahuan atau arahan kepada masyarakat dari desa tentang arah pembangunan desa memberikan jawaban yang tidak mengetahui apapun mengenai arah pembangunan, respon yang diberikan N6 sebagai berikut.

*Emang untuk kegiatan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) selalu ada, selalu dikasih arahan dari pihak desa, maupun pihak kecamatan tentang kegiatan pertanian kah, selalu ada. (Hasil wawancara 26 April 2021).*

Dapat dikatakan bahwa masyarakat mengetahui mengenai adanya proses musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa terhadap arah dan rencana pembangunan desa, namun masyarakat tidak mengetahui secara pasti hasil dari apa yang dibicarakan. Sehingga menyebabkan

masyarakat tidak dapat ikut berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan, hanya menjadi objek penerima yang bersifat pasif.

Masyarakat lebih mengetahui program-program pemerintah desa yang berupa bantuan, seperti UMKM, RTLH dan BLT-DD. Sebagaimana dinyatakan oleh N8 seorang buruh tani dan juga ibu rumah tangga, “Cuma bantuan usaha dan sembako aja, bibi mah ngga dapet bantuan uang. Dapetnya juga cuma sekali selama pandemi, ngga ada lagi (Hasil wawancara 27 April 2021).” Ketidaktahuan masyarakat bukanlah hal yang bisa disalahkan, hal ini dikarenakan program SDGs sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pejabat pemerintah desa hanya sebatas mengenai urusan pendataan individu mengenai data diri, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan masyarakat desa. Sehingga sangat diwajarkan jika SDGs sebagai simbol dari program pembangunan desa tidak diketahui oleh masyarakat. Juga dalam pembuatan program yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan, masyarakat juga tidak turut serta dilibatkan, melainkan hanya didasarkan pada perwakilan dari RT, RW, Kepala Dusun dan Pejabat Desa.

Meskipun masyarakat secara konkret tidak memahami mengenai program pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa tetap diharuskan turut serta melibatkan masyarakat dalam pembuatan program dan kebijakan pada nantinya. Dukungan masyarakat dalam pembangunan sangat berarti, mengingat program-program pembangunan yang ditujukan ialah untuk mensejahterakan masyarakat.

Lebih jauh, dalam Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) masyarakat harus diberikan andil dengan proporsi yang seimbang, tidak hanya sekedar diwakilkan oleh para Ketua RT, RW ataupun Kepala Dusun dan organisasi pendamping lainnya. Tetapi dimintakan terlebih dahulu pendapat dan persetujuan masyarakat dalam perencanaan dan perumusan suatu program atau kebijakan. Sehingga masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui program-program pengentasan kemiskinan, melainkan juga memahami maksud dan tujuan dari program tersebut.

- **Permasalahan-Permasalahan Dalam Penerapan SDGs Desa**

Dalam menjalankan suatu program, tentu terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Begitu juga dengan program SDGs Desa masih terdapat hambatan yang bisa menyebabkan tidak maksimalnya program.

Untuk saat ini masalah pendanaan masih menjadi pokok permasalahan yang ada, di mana desa tidak memiliki alokasi anggaran yang khusus untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dikarenakan sudah terdapat pos-pos bagi setiap anggaran tersebut, sehingga seringkali penggunaan dana tidak maksimal, N1 mengungkapkannya sebagai berikut.

*Kalau jumlah yang dikhususkan itu, kita ngga fokus ke sana. Karena sudah ada masing-masing*

*alurnya, misalkan untuk kesehatan berapa, untuk keagamaan berapa, ya tergantung perbup (peraturan bupati). Ngga bisa kita yang atur semua. Misal ada usulan apa, nah di sini lah baru turun anggaran. Bukan kaya gini, semisal 1 M. Nah terserah desa dana ini tu mau dipake apa aja (tidak seperti ini). Kalo kaya gini mah enak. (Hasil wawancara 20 April 2021).*

Permasalahan yang lain juga adalah dikatakan bahwa selama ini pemerintah desa tidak mempunyai otonomi. Tidak adanya otonomi di desa, menyebabkan desa tidak bisa menghasilkan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika pemerintah desa tidak mampu mengeluarkan program yang dibutuhkan, maka akan menimbulkan permasalahan dengan hadirnya program-program yang tidak sesuai kebutuhan, yang mana program yang tidak sesuai ini bisa menjadi beban atau permasalahan baru bagi desa.

Adanya aturan yang mengharuskan pemerintah desa melakukan alokasi anggaran terhadap program tertentu dari dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat, mengindikasikan bahwa pemerintah pusat tidak 100% percaya kepada pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan kesulitan dan pembatasan bagi pemerintah desa dalam menciptakan program-program unggulan yang didasari pada kondisi faktual di lapangan. Jika ketidakpercayaan ini terus diterjadi, maka pemerintah desa hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan atau program yang ada. Dana desa yang dikeluarkan untuk program SDGs Desa di wilayah desa Wargajaya sendiri tidaklah banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh N2, “Dari dana desa untuk SDGs Desa itu cuma 22 juta (Hasil wawancara 28 April 2021)”.

Dikarenakan kegiatan SDGs Desa kali ini bersifat daring melalui aplikasi pendataan SDGs Desa, maka aplikasi SDGs Desa menjadi salah satu permasalahan krusial. Hal ini dikarenakan keberadaan aplikasi SDGs Desa terbilang baru dan server yang mengusungnya tidak kuat, sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga seringkali aplikasi Pendataan SDGs Desa tidak bisa dibuka menggunakan username yang telah dimiliki oleh petugas pendataan SDGs Desa.

*Pertama misalnya terkait dengan aplikasi SDGs. Ini yang paling krusial yang dirasakan oleh temen-temen para relawan gitu, kenapa kemudian aplikasi yang jadi poin pertama permasalahannya karena kita menemukan dan mengalami ini sering tidak connect atau hang setelah log in misalnya ini tidak bisa apa ya, ketika inputannya sudah selesai tidak bisa disimpan. Kedua adalah terkadang teman-teman relawan ini masih kaku, masih kaku dalam proses pendataan. Tidak bisa membedakan mana kuesioner untuk individu, untuk RW, untuk perangkat desa. Ketiga sinyal, di Desa Wargajaya ada beberapa dusun yang sinyalnya masih jelek jaringannya. Cuma kita ada solusinya, solusinya berkaitan dengan aplikasi juga. Dalam aplikasi tersebut kan bisa di save dulu, kemudian di kirim. Kita mendorong kepada temen-temen relawan ini, yang bertugas di wilayahnya susah sinyal, kita arahkan untuk disave dulu baru nanti berpindah ke rumah yang mana misalnya atau ke daerah yang mana yang sinyalnya bagus, baru di situ kita kirimkan datanya, selesai. (Hasil wawancara dengan N5, 26 April 2021)*

Permasalahan ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh Kemendesa dan pejabat-pejabat lainnya,

bahwa untuk melaksanakan program berbasis aplikasi daring diperlukan aplikasi dan server yang mapan agar tidak menghambat proses pelaksanaannya. Terlebih lagi, desa di Indonesia masih banyak yang belum memiliki jaringan internet yang kuat dan stabil sehingga menjadikan pengambilan data dan penggunaan aplikasi lebih sulit dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Pemahaman dari para relawan desa yang masih kurang memahami bagaimana cara-cara untuk melakukan pendataan dengan berbagai bentuk kuesioner bisa memberikan hasil yang menyimpang dari data yang seharusnya.

Tidak hanya itu, proses pengawasan dalam penginputan data yang sukar dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa yang dalam hal ini sebagai admin untuk memantau jumlah warga yang telah terdata dan berapa persen data yang telah masuk masih menjadi kendala. Tanpa pengawasan yang baik dan maksimal, suatu program kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

*Kendalanya itu, kebetulan saya pernah masuk ke aplikasi yang juga punya Pak H (admin), jadi admin itu ngga bisa mantau atau ngeliat perkembangan data dilapangan, jadi apa fungsinya admin kalo gabisa ngemantau aplikasinya. (Hasil wawancara dengan N4, 17 April 2021).*

Persoalan lain yang ditemui adalah ketidaksinkronan antara data yang dimiliki desa dengan data yang sudah terinput dalam aplikasi SDGs Desa. Desa telah memiliki data sebelumnya mengenai berapa jumlah warga yang dimiliki desa, namun ketika proses pendataan selesai, ternyata jumlah yang terdata dalam aplikasi berbeda dengan yang dimiliki oleh desa.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Selama ini diketahui bahwa desa merupakan wilayah dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak, selain itu desa juga sering dianggap sebagai wilayah terbelakang karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh desa. Untuk menjawab tantangan tersebut dihadirkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) sebagai program pembangunan berkelanjutan dan inklusif bagi desa. SDGs Desa merupakan suatu program pembangunan turunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2020 sebagai upaya untuk menyediakan program pembangunan yang bersifat inklusif dan memaksimalkan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan dari SDGs Desa terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat desa menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui tentang bagaimana SDGs Desa bekerja untuk penanggulangan kemiskinan.

2. Tidak hanya berkaitan dengan program-program kesejahteraan bagi masyarakat desa, SDGs Desa juga berfungsi dalam memonitoring keadaan masyarakat desa. Monitoring dilakukan melalui data-data yang masuk ke dalam sistem SDGs Desa yang telah diisi oleh para relawan dan perangkat desa, sehingga kondisi desa bisa dipantau secara langsung oleh Kemendes atau pemerintah pusat dalam penggunaan dana desa, progres program desa, tingkat kesejahteraan, dan sebagainya.
3. Pembangunan yang dilaksanakan oleh SDGs Desa di Desa Wargajaya yang menjadi lokasi penelitian dari peneliti masih berada pada tahap awal, yaitu pendataan masyarakat secara menyeluruh yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Pendataan SDGs Desa yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Proses pendataan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan kondisi masyarakat secara faktual. Pertanyaan yang diajukan seputar (1) identitas diri individu sebagai warga, (2) sumber penghasilan berdasarkan gaji, hasil peternakan dan pertanian, (3) kesehatan, dan (4) pendidikan. Data tersebut nantinya dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam membuat suatu kebijakan dan program, agar kebijakan dan program yang dicanangkan berjalan sesuai dengan harapan dan menemui sasaran yang tepat. Selama ini kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa menemui kendala dari ketiadaan data yang akurat mengenai kondisi masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kehadiran SDGs Desa dengan melakukan pendataan bisa menjadi langkah awal dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
4. Masyarakat Desa Wargajaya ketika ditanyai mengenai SDGs, khususnya SDGs Desa tentang pembangunan berkelanjutan tidak mengetahui dan memahami. Masyarakat hanya mengetahui program-program yang berkaitan dengan bantuan-bantuan berbentuk materi, seperti uang, sembako dan UMKM.
5. Permasalahan yang dihadapi desa dalam pelaksanaan SDGs Desa ialah ketidakjelasan anggaran yang ada dan aturan-aturan mengenai penggunaan anggaran, sehingga pemerintah desa tidak bisa secara leluasa mengeksplorasi dan memaksimalkan anggaran dana desa yang diberikan. Pemahaman para relawan yang melakukan pendataan juga menjadi masalah, relawan tidak memahami cara melakukan pendataan dan mengajukan pertanyaan secara baik. Server yang tidak kuat menyebabkan admin desa (dalam hal ini PLD) tidak dapat memantau secara *real time* proses pendataan dan hasil pendataan. Desa Wargajaya yang berada jauh dari perkotaan menyebabkan beberapa dusun kesulitan mendapatkan sinyal untuk mengunggah data-data yang telah didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asselin, L.-M. (2015). Analysis of Multidimensional Poverty: Theory and Case Studies. In *Springer*

*International Development Research Centre (Vol. 7).*

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Desa Wargajaya. (2019). *Indeks Desa Membangun Wargajaya 2019*.
- Digdowniseiso, K. (2012). Teori Pembangunan Sosial. *1 Mei*, 1–15. <http://sehansnza.blogspot.com/2012/05/teori-pembangunan-sosial.html>
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. CV Pustaka Setia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pub. L. No. 13, 1 (2020). <http://sdgsdesa.kemendesa.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (2020).
- Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. (2021). *Pendataan SDGs Desa 2021*. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/pemutakhiran-data-sdgs-desa/>
- Murniningtyas, E., & Alisjahbana, A. S. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Vol. III (Issue 2)*.
- Osborn, D., Cutter, A., & Ullah, F. (2015). Universal Sustainable Development Goals: Understanding the transformational challenge for developed countries. *Universal Sustainable Development Goals*, *May*, 1–24. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1684&menu=35>
- Prasetya, A. A., Taufiq, N., & Mumtaz, T. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*.
- Rumikno Adi, I. (2018). *Kesejahteraan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, H. (2021). SDGs Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Pelatihan Penyusunan RJM Desa Kabupaten Bogor*.
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Evaluasi*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV.
- Utami, D. (2018). *Pendekatan Top Down Versus Bottom Up*. 2–10. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/PENDEKATAN+TOP+DOWN+VERSUS+BOTTOM+UP.pdf>
- Woodbridge, M. (2015). From MDGs to SDGs: What are The Sustainable Development Goals? *Urban Issues*, *01(01)*, 04.